

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi. Perkembangan jumlah penduduk di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan penduduk di Indonesia dapat dikategorikan relatif tinggi sehingga berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif. Salah satu diantaranya adalah meningkatnya permukiman kumuh. Berdasarkan perkiraan, jumlah penduduk Indonesia di tahun 2020 akan mencapai 271.066.400 jiwa. Selain itu, lokasi tinggal penduduk di Indonesia akan mengalami pergeseran yang memicu terjadinya urbanisasi. Urbanisasi diperkirakan mencapai 67,66% penduduk akan tinggal di perkotaan di tahun 2025 (Dickenson. JP, dkk 1986; Yunus, 2005; Badan Pusat Statistik, 2017).

Belum berhasilnya permukiman di perkotaan erat kaitannya dengan persoalan urbanisasi. Urbanisasi terwujud hanya jika ada tingkat pertumbuhan populasi perkotaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk pedesaan. Namun, di daerah perkotaan juga berpartisipasi terhadap pertumbuhan populasi perkotaan, oleh karena itu, populasi perkotaan dari setiap sudut tumbuh dengan cepat dengan migrasi, peningkatan alam, reklasifikasi perubahan batas. Karena pada saat ini pekerjaan seperti petani dan nelayan di desa - desa menurun dan beralih menjadi pegawai industri dan jasa di perkotaan (Yudohusodo, 1995; Christiawan, 2019a).

Kawasan kumuh (*slum area*) dapat di artikan sebagai wilayah pemukiman yang tidak layak untuk di huni dengan alasan kepadatan penduduk, ventilasi udara yang kurang menyebabkan pemukiman tersebut pengap, desain bangunan sempit atau pengaturan yang salah jalan. Kawasan yang tidak diperuntukkan sebagai kawasan pemukiman di banyak kota besar, oleh masyarakat miskin berpenghasilan rendah dan tidak bertempat tinggal tetap, seperti bantaran sungai, di samping jalur kereta api, tanah kosong di sekitar pabrik atau pusat kota dan kolong jembatan. Beberapa ciri-ciri daerah kumuh (Yudohusodo, 1991; Menno, 1994; Syaiful. A, 2002).

Perumahan dan permukiman adalah dua hal yang memiliki kaitan yang sangat erat dengan aktivitas ekonomi, industrialisasi, dan pembangunan. Permukiman sebagai perumahan dengan segala unsur kegiatan yang berkaitan dalam permukiman. Berbagai fenomena yang berkaitan dengan perumahan dan permukiman dapat kita temui di Indonesia. Salah satunya adalah fenomena permukiman kumuh. Rumah membutuhkan kenyamanan, sekaligus merupakan tempat pengasingan, keamanan, dan keselamatan. Rumah bagi sebuah masyarakat mewakili seluruh identitasnya dan identitas dari kultur di suatu wilayah. Lebih lanjut, rumah merupakan sebuah konsep mengenai tempat memperoleh perlindungan-Nya di bumi. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman didefinisikan sebagai bagian dari lingkungan hunian (Sanropie.Djasio, 1992; Omer, 2010; UU No. 1 Tahun 2011).

Tingkat kebutuhan lahan di perkotaan semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di kota dan membutuhkan lahan tempat tinggal. Bagi kelompok ekonomi kuat lebih menyukai tinggal di daerah pinggiran kota, sementara kelompok penduduk berekonomi lemah memilih bertempat tinggal di daerah pusat kota atau yang dekat dengan tempat kerja meskipun dengan kondisi lingkungan yang marginal. Dari kondisi tersebut, kemudian menciptakan struktur permukiman yang dibagi menjadi perumahan elit dan permukiman kelas bawah atau sering disebut permukiman kumuh (Bahr, 1990; Johara T.J, 1999; Sujarto, 2013).

Permukiman kumuh sebagai permukiman mandiri (*autonomous settlement*). Pemecahan masalahnya dilakukan oleh masyarakat sendiri sesuai kemampuan mereka sendiri. Secara umum, daerah kumuh diartikan sebagai suatu kawasan pemukiman atau bukan kawasan pemukiman. Hal ini sebagai tempat tinggal yang kondisi bangunannya tidak memenuhi standar ideal atau tidak layak yang dihuni oleh penduduk golongan ekonomi bawah. Munculnya kawasan permukiman kumuh menjadi indikasi kegagalan program perumahan. Hal ini disebabkan ketergantungan pada pihak produksi rumah, terutama bagi masyarakat golongan ekonomi menengah ke atas (Turner, 1976; Nurwati, 2008; Edi Suharto, 2008).

Program pemberdayaan masyarakat dalam menyediakan rumah yang layak bagi dirinya sendiri belum terlaksana dengan optimal. Sementara itu, konsentrasi program pemerintah pada rumah milik telah mengabaikan realitas potensi rumah sewa. Salah satu alternatif pemecahan masalah perumahan terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah ke bawah. Selain itu, latar belakang lain dari menjamurnya permukiman kumuh adalah karena tingginya tingkat urbanisasi. Maka terjadi implikasi pada berbagai aspek kehidupan kota. Contohnya implikasi menyangkut transportasi, perumahan, kesehatan lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana umum, sektor tenaga kerja, perekonomian kota, tata ruang, dan sebagainya (Mubyarto, 1997; Chamsyah, 2006; Dwyangga, 2009).

Pemukiman kumuh dapat di definisikan ke dalam empat persepektif. Pertama, kondisi perekonomian masyarakat di bawah pendapatan yang seharusnya. Kedua, lingkungan masyarakat padat penduduk (melebihi 500 orang per Ha). Ketiga, sarana prasarana tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat kesehatan dan teknis. Keempat, sangat padatnya penduduk dan ukuran tiap unit rumah berbeda beda dan dibawah standar, dan rumah tiap hunian di bangun diatas tanah milik orang lain atau Negara diluar perundang udangan yang berlaku. Pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan semakin besarnya kebutuhan ruang untuk tempat tinggal sehingga menyebabkan berkembangnya permukiman tidak terkontrol (Simon dkk, 2013; Ekatarji, Yunus, & Rahardjo, 2016).

Kualitas lingkungan permukiman adalah derajat kemampuan suatu permukiman untuk memenuhi kebutuhan hidup. Penurunan kualitas lingkungan permukiman biasanya dicirikan dengan munculnya permukiman kumuh dengan karapatan bangunan tinggi. Kualitas lingkungan dapat menunjukan tingkat kelayakan suatu kota untuk ditinggali. Kualitas lingkungan permukiman dapat ditinjau dengan memperhatikan kondisi fisik lingkungan permukiman. Beberapa kondisi fisik permukiman yang dapat digunakan untuk mengkaji kualitas permukiman adalah kepadatan permukiman, pola tata letak bangunan, lebar jalan masuk, kondisi jalan masuk, pohon pelindung, dan lokasi permukiman (Yunus, 1980; Sembiring, 2017).

Berdasarkan morfologinya terdapat enam kategori pemukiman kumuh, yaitu di sekitar industri, di daerah permukiman, memanjang samping rel kereta api, saluran pengatus dan jalan, di sekitaran kolam atau waduk, di daerah proyek perumahan dan di daerah pertanian. Pola penanganan permukiman kumuh yang dilihat dari hasil penilaian aspek kondisi kumuh dan aspek legalitas tanah. Pola-pola penanganan permukiman kumuh terdiri dari 3 tahap menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh, adapun beberapa tahap dalam pola penanganan permukiman kumuh, meliputi: pemugaran, peremajaan dan pemukiman Kembali (Suharini, 2007; Farizki, 2017).

Teknologi penginderaan jauh jarang digunakan untuk memetakan sebaran spasial permukiman kumuh, khususnya di kawasan Kota Bandung. Dalam mengkaji permukiman kumuh lebih ditekankan pada faktor-faktor penyebab keberadaan dan penumpukan permukiman kumuh. Penelitian dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis merupakan strategi inovatif dalam memvisualisasi spasial dari permasalahan yang ada untuk menghasilkan informasi spasial yang akurat. Mengingat pentingnya mempelajari masalah permukiman kumuh (Christiawan & Budiarta, 2017; Ilmy & Budisusanto, 2017; Barbara & Umilia, 2014; Setiadi, 2014)

Data citra yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data citra multitemporal berupa citra SPOT-6 tahun 2022. Data Citra SPOT efektif digunakan untuk area yang tidak terlalu luas karena memiliki resolusi spasial tinggi. Pada penelitian ini citra tersebut memungkinkan dapat digunakan sebagai dasar pemetaan penggunaan lahan dalam lingkup kajian level kecamatan. Citra yang dihasilkan oleh satelit SPOT memiliki resolusi sebesar 1.5meter Pankromatik dan 8meter multispectral. Analisis multitemporal dengan data penginderaan jauh dapat membantu dalam pemantauan secara terus menerus dari perkembangan kota sehingga dapat digunakan untuk keperluan prediksi-prediksi perubahan penggunaan lahan. (Blue, Green, Red, Near-IR).

Permukiman kumuh selalu menjadi masalah yang terdapat di kota-kota besar di Indonesia. Salah satunya yaitu Kota Bandung. Permukiman ini umumnya dihuni oleh para penghuni desa atau dari kota yang lebih kecil yang sengaja berpindah/datang menetap di kota yang lebih besar. Dengan alasan untuk ikut bersama-sama di dalam kegiatan ekonomi kota. Biasanya berdampak pada perkembangan perekonomian yang begitu pesat dari suatu kota. Sebaran kawasan kumuh Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Bandung Nomor 648/Kep.286 Distarcip/2015 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Bandung, terdapat 454 sebaran permukiman kumuh di 151 kelurahan pada 30 kecamatan, dengan total luas kawasan kumuh sebesar 1.457,45 Ha (Soni, 2001; SK Walikota Bandung Nomor 648/Kep.286, 2015; Nurwati,2008).

Kondisi semacam ini mempengaruhi kuantitas dan kualitas perumahan. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan pasal 7point b menjelaskan bahwa ruang sisi kiri dan kanan dari jalur kereta api minimal 10meter dihitung dari as rel terluar. Permasalahan dalam pembangunan perumahan di daerah sepanjang rel kereta api Kota Bandung adalah kurang tertatanya sarana jalan, banyaknya sampah yang berserakan, kurang tertatanya sarana permukiman, serta kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Kondisi semacam ini mempengaruhi kuantitas dan kualitas perumahan, bahkan seringkali menumbuhkan permukiman kumuh. (Peraturan Menteri Perhubungan, 2011; BPS Kota Bandung 2018).

Kota Bandung memiliki wilayah kumuh terbesar di Provinsi Jawa Barat. Dari total 151 kelurahan yang ada di Kota Bandung, terdapat 121 kelurahan yang masuk kategori kumuh. Status kepemilikan bangunan tempat tinggal di Kota Bandung dapat dibedakan menjadi tiga yaitu milik sendiri, sewa/kontrak, dan lainnya. Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Barat, status kepemilikan bangunan tempat tinggal milik sendiri pada tahun 2018 sebesar 74,16% dan kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 78,87%. Sementara itu persentase status kepemilikan bangunan tempat tinggal sewa/kontra dan lainnya mengalami penurunan (Badan Pusat Statistik Kota Bandung, 2018; *Kota Bandung Dalam Angka, 2020*).

Kota Bandung diketahui memiliki wilayah kumuh terbesar di Provinsi Jawa Barat. Dari total 151 kelurahan yang ada di Kota Bandung, terdapat 121 kelurahan yang masuk kategori kumuh. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 2 Tahun 2016, Pemukiman kumuh adalah pemukiman yang tidak memenuhi syarat untuk dihuni karena bangunan yang tidak teratur, kepadatan tinggi, serta kualitas bangunan dan fasilitas yang belum memenuhi syarat. Pemukiman kumuh ini biasanya terdapat pada lahan kosong, misalnya di jalur hijau sepanjang bantaran sungai, rel kereta api, taman kota, ataupun di bawah jembatan layang (Osborne, 1995:14; Jamaludin, 2015:315).

Perkembangan kota yang tanpa arah tersebut menyebabkan Kota Bandung memiliki masalah dalam perkembangan permukiman, khususnya permukiman kumuh. Kota Bandung sebagai kota metropolitan ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya memiliki permasalahan permukiman kumuh yang kompleks yang berkaitan dengan kemiskinan dan kesenjangan serta ketidak disiplin sosial maupun yang menyangkut kemampuan lembaga-lembaga pemerintah dalam pengaturan, pengorganisasian spasial maupun sumberdaya yang dimiliki kota sesuai hakekat fungsi kota (Suraswati, 2001; Syaiful A. 2002:1).

Tujuan dari penelitian ini yaitu menilai kondisi fisik bangunan yang menggambarkan permukiman kumuh di sepanjang rel kereta api Kota Bandung bagian Timur. Ketersediaan sarana prasarana dalam menunjang keberadaan masyarakat di permukiman kumuh tersebut, dan menganalisis faktor yang mempengaruhi tingkat kumuh kawasan tersebut. Berdasarkan jurnal terdahulu, penelitian permukiman kumuh di sepanjang rel kereta api Kota Bandung bagian Timur masih jarang. Sehingga penelitian ini penting dilakukan.

Pada Kota Bandung sendiri, perkembangan permukiman liar ini banyak terjadi pada sempadan rel kereta api. Sedangkan, daerah sempadan Jalan Rel Kereta Api adalah kawasan sepanjang jalan rel kereta api yang dibatasi oleh batas luar damija (Daerah Milik Jalan) dan damaja (Daerah Manfaat Jalan) (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 Bab I Pasal 1). Dengan permasalahan permukiman di atas, maka perlu diadakan penelitian mengenai: “Pola Permukiman Kumuh di Sepanjang Rel Kereta Api Kawasan Kota Bandung Timur Menggunakan Citra Spot-6”.

1.2. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang dan permasalahan yang ada, studi ini mempunyai tujuan yaitu untuk menghasilkan rumusan kebijakan. Sebagaimana untuk mewujudkan wilayah yang nyaman secara fisik, aman dari bencana, layak untuk hidup (*Livable*), dan berkelanjutan secara lingkungan. Maka, penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat dan pola permukiman kumuh di area rel kereta api Kota Bandung bagian timur?
2. Bagaimana kualitas lingkungan permukiman di area rel kereta api Kota Bandung bagian timur?
3. Faktor apa yang mendorong penduduk sehingga membangun permukiman kumuh di area rel kereta api Kota Bandung bagian timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu:

1. Menganalisis tingkat dan pola permukiman di area rel kereta api di Kota Bandung bagian timur.
2. Menganalisis kualitas lingkungan permukiman kumuh di area rel kereta api Kota Bandung bagian timur.
3. Menganalisis faktor – faktor yang mendorong penduduk sehingga membangun permukiman kumuh di area rel kereta api di Kota Bandung bagian timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pendahuluan, identifikasi rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi mahasiswa dalam melengkapi kajian yang mengarah kepada pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan implementasi kebijakan penanganan permukiman kumuh di sepanjang rel kereta api Kota Bandung bagian timur.

2. Manfaat Praktis

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat, yaitu:

Siti Nurholisah Setia Permana, 2023

ANALISIS PERMUKIMAN KUMUH DAN KUALITAS LINGKUNGAN DI AREA REL KERETA API KAWASAN KOTA BANDUNG BAGIAN TIMUR MENGGUNAKAN CITRA SPOT 6

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

a. Bagi Penulis

Untuk memperdalam dan menambah pengetahuan dan wawasan mengenai bagaimana implementasi kebijakan penanganan permukiman kumuh di sepanjang rel kereta api Kota Bandung bagian timur.

b. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian selanjutnya di Prodi Sains Informasi Geografi, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.

c. Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dibaca oleh masyarakat khususnya mereka yang tinggal di permukiman kumuh.

1.5. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasionalisasi yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tertentu. (Nazir 1999:152)

1. Permukiman

Permukiman berarti memberi pengertian tentang pemukim (manusia) atau sekumpulan pemukim dengan sikap dan tingkah lakunya di dalam lingkungan. Hal tersebut menekankan bahwa permukiman adalah sesuatu yang bukan bersifat fisik atau benda mati yaitu manusia (*human*). Sedangkan perumahan memiliki fokus kepada fisik atau benda mati.

2. Pola

Konsep pola yaitu berkaitan dengan persebaran fenomena di permukaan bumi baik fenomena yang bersifat alami seperti aliran sungai, persebaran vegetasi, jenis tanah, dan curah hujan maupun fenomena sosial budaya seperti permukiman, persebaran penduduk, mata pencaharian, dan jenis perumahan tempat tinggal penduduk.

3. Pemukiman Kumuh

Permukiman kumuh adalah lingkungan hunian yang kualitasnya sangat tidak layak huni, ciri-cirinya antara lain berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan/tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya. (Budiharjo 1997)

Pemukiman kumuh dapat di definisikan ke dalam empat persepektif (Simon, Adegoke, & Adewale, 2013). Pertama, kondisi perekonomian masyarakat di bawah pendapatan yang seharusnya. Kedua, lingkungan masyarakat padat penduduk (melebihi 500 orang per Ha). Ketiga, sarana prasarana tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat kesehatan dan teknis. Keempat, sangat padatnya penduduk dan ukuran tiap unit rumah berbeda beda dan dibawah standar, dan rumah tiap hunian di bangun diatas tanah milik orang lain atau Negara diluar perundang udangan yang berlaku. Pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan semakin besarnya kebutuhan ruang untuk tempat tinggal sehingga menyebabkan berkembangnya permukiman tidak terkontrol, terutama permukiman kumuh yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas permukiman, khususnya didaerah perkotaan (Ekatarji, Yunus, & Rahardjo, 2016).

4. Kualitas Lingkungan

Kualitas lingkungan adalah keadaan dan kondisi faktor atau komponen lingkungan hidup, baik abiotik maupun abiotik, yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dan/atau memenuhi standard mutu lingkungan.

Lingkungan yang berkualitas dicirikan oleh keadaan dan kondisi lingkungan yang saling hidup satu sama lainnya (*interdependency*), adanya hubungan antara yang selaras antara faktor atau komponen lingkungan hidup, kemampuan adanya keberagaman, seluruh faktor lingkungan hidup melaksanakan tugas sesuai fungsinya masing-masing, adanya arus informasi yang diperoleh dari kondisi lingkungan yang dijadikan sebagai pengetahuan, dan keadaan atau kondisi tersebut harus diusahakan agar dapat berlangsung secara berkelanjutan (*sustainability*).

1.6. Penelitian Terdahulu

Pada **tabel 1.1** merupakan hasil penelitian terdahulu yang dijadikan referensi untuk penelitian ini. Adapun yang membedakan dengan penelitian terdahulu yaitu lokasi penelitian dan penggunaan metode yang digunakan pada saat pengambilan data.

| No. | Nama Penulis | Lembaga | Judul | Tujuan | Metode | Hasil |
|-----|---|---|--|--|--|--|
| 1. | Sri Mariya, Rery Novio dan Ahyuni, 2019 | Jurnal Geografi UNP | Pemetaan Kawasan Kumuh Dan Squatter Area Di Kota Padang | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi Kawasan permukiman kumuh (slum area) dan kawasan illegal/liar (squatter area) berdasarkan indikator dan parameter untuk setiap masing-masing kawasan. | Penelitian deskriptif kuantitatif dengan populasi adalah seluruh kecamatan di Kota Padang dengan pengambilan sampel secara total sampling. | Hasil pemetaan slum area dan squatter area kota Padang tersebar di 7 kelurahan di 5 Kecamatan. Seberang Palinggam tipologi kawasan kumuh Pinggir Sungai, Batang Arau tipologi Kawasan kumuh Pinggir Sungai, Pasa Gadang Kecamatan Padang Selatan tipologi kawasan kumuh Pinggir Sungai, Sawahan Timur Kecamatan Padang Timur tipologi Kawasan kumuh Pinggir rel kereta api. |
| 2. | Triana Wahyu Prayojana, Mardhatil, Ade Nurul Fazri, Beben Saputra, 2020 | Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Lingkungan | Dampak Urbanisasi Terhadap Pemukiman Kumuh (Slum Area) | Menganalisis dampak laju pertumbuhan penduduk yang pesat di daerah perkotaan sehingga menimbulkan masalah terhadap lingkungan, salah satu masalah yaitu timbulnya pemukiman kumuh (slum area) pada lahan-lahan kosong di daerah perkotaan. | Metode yang digunakan yaitu Literature Review atau tinjauan Pustaka | Penghuni pemukiman kumuh (daerah slum) adalah sekelompok orang yang dating dari desa menuju kota dengan tujuan ingin mengubah nasib. Akibatnya mereka berada dalam kehidupan ekonomi yang miskin karena hanya memiliki penghasilan yang rendah tetapi harus berhadapan dengan biaya hidup yang tinggi dikota. |
| 3. | Eny Endang Surtiani, 2006 | Academia.edu, Universitas Diponegoro Semarang | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terciptanya Kawasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Pusat Kota | Untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab kekumuhan lingkungan Kawasan Permukiman Pancuran yang ada di | Metode Analisis Deskriptif Kuantitatif dan Metode Analisis Deskriptif Normatif | Faktor yang mempunyai pengaruh kuat penyebab Kawasan Pancuran menjadi kumuh adalah tingkat penghasilan, status kepemilikan hunian, dan lama tinggal. Dari hasil |

| | | | | | | |
|----|------------------------|--------------------------|--|--|--|---|
| | | | (Studi Kasus: Kawasan Pancuran Salatiga) | kawasan pusat Kota Salatiga, dalam upaya memberikan alternatif penyelesaian masalah berupa rekomendasi perencanaan lingkungan, sehingga mampu meningkatkan fungsi dan kualitas Kawasan Permukiman Pancuran Kota Salatiga. | | analisis, maka dapat direkomendasikan upaya perbaikan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman di kawasan Pancuran ke arah yang lebih baik. Salah satu diantaranya adalah penataan kawasan melalui pembangunan RUSUNWAMA. |
| 4. | Rika Afrilla, 2020 | Universitas Negeri Medan | Keadaan Sosial Budaya Penduduk di Permukiman Kumuh Pinggir Rel Kereta Api Kelurahan Pulo Brayan Kota Kecamatan Medan Barat | untuk mengetahui faktor-faktor penyebab timbulnya pemukiman kumuh di Kelurahan Pulo Brayan Kota, serta keadaan sosial budayanya termasuk di antaranya interaksi sosial antar sesama penduduk, dan tetap bertahan tinggal di pinggir rel kereta api | Metode Penelitian: Deskriptif Kualitatif Pendekatan: Kualitatif | Pendidikan responden rata-rata tamatan SD dan SMP, sehingga pengetahuan responden rendah, dan hal ini yang membuat mereka sulit mendapatkan pekerjaan di kota, karena sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak yang membuat ekonomi mereka pun menjadi tidak berkecukupan. Akibatnya mereka memilih tinggal di pemukiman kumuh pinggir rel kereta api dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai. |
| 5. | Neni Runingdiyah, 2005 | The Open University | Sistem Informasi Geografis Untuk Penanganan Masalah Perumahan Kumuh Di Kota Bandung (Studi Kasus Daerah Tamansari) | Tujuannya adalah dapat memudahkan pengaturan dan perencanaan sehingga mampu meminimalisasi masalah yang timbul dan membuat alternative yang lebih baik untuk mempermudah proses operasional serta pengambilan keputusan | Metode yang digunakan dalam pembangunan aplikasi ini meliputi studi literature dan pengumpulan data. | Aplikasi SIG yang dibuat ini memberikan informasi kepada Bappeda untuk memudahkan dalam pengaturan tata ruang kota sehingga perencanaan program pengentasan kemiskinan dan pengalokasian perumahan serta pemberian bantuan untuk penanganan perumahan kumuh menjadi tepat sasaran serta Gambar/peta lokasi sudah dapat |

| | | | | | | |
|----|-----------------------------|--|---|--|---|---|
| | | | | demi penanganan masalah perumahan kumuh. | | dilakukan dengan menggunakan analisa yang bersifat overlay dan interaktif. |
| 6. | Mohammad Agung Ridlo, 2020 | Jurnal Planologi | PERMUKIMAN LIAR (SQUATTER SETTLEMENT) DI JALUR KERETA API KOTA SEMARANG | 1. Mengetahui konflik keruangan di jalur kereta api. 2. Memberikan gambaran tentang pemanfaatan ruang di jalur kereta api. 3. Mengetahui kebijakan ruang pada jalur kereta api. | Diskriptif kualitatif, melalui observasi empirik, interaktif, dengan metoda induktif | Setiap individu mempunyai hak untuk pemenuhan kebutuhan tempat tinggal. Demikian pula halnya orang-orang miskin di perkotaan, perlu mendapat perhatian dari pemerintah dalam mencukupi kebutuhan tempat tinggal yang layak bagi mereka. Squatter settlement ada karena mereka (orang-orang miskin) menghadapi berbagai kendala dan keterbatasan dalam mendapatkan perumahan yang layak. |
| 7. | Cut Dhaifina Malahati, 2015 | Academia.edu, Universitas Sumatera Utara | Pola Permukiman Masyarakat di Pinggiran Rel Kereta Api (Studi Kasus: Permukiman Lingkungan XII Jalan Arteri Ringroad Medan) | Untuk mengetahui alasan masyarakat bertempat tinggal di lahan yang berstatus ilegal, untuk mengetahui faktor-faktor yang menimbulkan tumbuhnya permukiman liar di pinggiran rel kereta api, dan untuk mengetahui kondisi lingkungan permukiman | Metode Deskriptif Kualitatif Pendekatan: Kualitatif | Dapat mengetahui alasan masyarakat bertempat tinggal di permukiman tersebut, dan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tumbuhnya permukiman liar di pinggiran rel kereta api, dan mengetahui kondisi lingkungan permukiman tersebut terkait dengan kecenderungan bermukim melalui observasi dan wawancara ke penduduk di permukiman pinggir rel kereta api. |
| 8. | Arraniri Alfarisyi, 2018 | Universitas Pasundan | Kajian Penanganan Permukiman Kumuh Kelurahan Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung | Untuk menghasilkan rumusan kebijakan yang diharapkan dapat menjadi landasan penanganan kawasan permukiman rumah kumuh di Kota | Metode analisis Deskriptif kualitatif, dan deskriptif kuantitatif (menggunakan tabulasi skoring) dengan melihat | Hasil dari penelitian ini adalah sebagian lokasi permukiman di Kelurahan Babakan Ciamis memiliki tingkat kekumuhan sedang, yang terdapat pada blok 3 dan 4, dengan pola penanganan yang dilakukan relokasi atau permukiman kembali |

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|--|--|---|--|--|
| | | | | Bandung, tepatnya di wilayah Babakan Ciamis. | indikator kekumuhan, dan tipologi kekumuhan, serta perumusan penanganan dengan Mapping melalui GIS tools | karena pada lokasi blok permukiman memiliki status tanah ilegal, sedangkan pada lokasi yang memiliki kejelasan status tanah dilakukan pemugaran yang sesuai dengan parameter kekumuhan. |
| 9. | Anisa Dalilah dan Riki Ridwana, 2019 | Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial | Pemanfaatan Penginderaan Jauh Untuk Identifikasi Pemukiman Kumuh di Kota Bandung | Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui gambaran mengenai pola persebaran permukiman kumuh di kota bandung, Identifikasi permukiman kumuh dilakukan dengan cara memanfaatkan penginderaan jauh serta didukung oleh Ground cek ke lapangan untuk memastikannya supaya data yang diperoleh akurat, dengan memperhatikan variable tata letak, ukuran atap, dan kerapatan bangunan. | Metode analisis untuk mengetahui pola persebaran permukiman kumuh dengan menggunakan 13 teknik analisis tetangga terdekat untuk mengetahui jarak permukiman kumuh terhadap sungai menggunakan Buffer analisis. | Pemukiman kumuh terendah dengan persentase 2.15% atau dengan luasan 15.747ha terdapat di wilayah Cicadas, Regol, Sukajadi, dan Babakan Ciparay. Sedangkan kategori permukiman kumuh sedang 10.97 atau luasan 80.37ha terdapat di wilayah Margacinta, Sukajadi dan Regol. Dan juga kategori permukiman kumuh tinggi dengan persentase 86.88% atau dengan luasan 636.809ha terdapat di wilayah Bandung Kulon, Kiara Condong, Cobleng, dan Bojongloa Kaler. |
| 10. | Raisha Ghadati Raudina, 2020 | International Journal of Architecture and Urbanism | Urban Settlement Patterns in edge of Railroad in Medan City | Bertujuan untuk mengidentifikasi pola persebaran permukiman di sepanjang jalur kereta api Kota Medan. | Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif | Pola permukiman di bantaran rel kereta api Kota Medan adalah linier, dan permukiman berkembang karena faktor ekonomi, topografi, dan infrastruktur. |

Tabel 1.1 Jurnal Penelitian Terdahulu

Sumber: Analisis Penulis (2023)